**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud maka pemanfaatan potensi sumberdaya alam menjadi pilihan strategis untuk diimplementasikan. Salah satu potensi sumberdaya alam yang mampu memberikan kontribusi bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional adalah potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dapat diwujudkan melalui pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional maka Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan institusi yang bertanggungjawab terhadap pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia telah menetapkan visinya yakni " Indonesia Sebagai Penghasil Produk Perikanan Terbesar Dunia Tahun 2015 ".

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang merupakan subordinasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di tingkat kabupaten dalam merumuskan visinya senantiasa merujuk pada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapaun visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yakni " Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal dan Bertanggungjawab, Menjamin Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan ". Untuk mewujudkan visi dimaksud maka terdapat beberapa upaya yang harus dilaksanakan sebagaimana tergambar dalam misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yakni meningkatkan sistem pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparat, nelayan dan petani ikan; menyediakan sarana dan prasarana pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan pada visi dan misi tersebut diatas maka pembangunan Kelautan dan Perikanan kabupaten Merauke telah dijabarkan dan diaktualisasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan embrio dari program kerja SKPD. Arah dan kebijakan program Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2011 mengacu kepada RPJMD dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun 2011 – 2016.

Untuk mencapai Visi dan Misi, maka kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan lebih difokuskan pada kegiatan yang turut serta mengatasi krisis beserta dampak yang ditimbulkannya. Strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan lebih difokuskan pada :

1. Pengembangan SDM aparat dan masyarakat perikanan (nelayan, pembudidayaan ikan, pengolah dan POKWASMAS)
2. Pengembangan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan Merauke
3. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap
4. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya
5. Pemberdayaan masyarakat perikanan dan kelautan

Disamping itu agar pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan menjadi lebih mantap dan terarah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penataan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan Kabupaten Merauke.
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas, kreatif, inovatif dan berwawasan konstruktif ke depan.
4. Meningkatkan taraf hidup dan peluang usaha bagi nelayan dan petani ikan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan kelautan dan perikanan.

Kebijakan-kebijakan yang diambil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dalam kerangka strategi pencapain tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan yang bertanggung jawab.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
3. Peningkatan peluang usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Merauke sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dipusat dan kebijaksanaan pembangunan di daerah maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan urusan pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Berkenaan dengan berakhirnya tahun anggaran 2011 maka disusun Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dicapai.

* 1. **Keadaan Geografis**

Kabupaten Merauke terletak di wilayah paling Timur Indonesia. Secara Geografis wilayah Kabupaten Merauke terletak antara koordinat 137030-141000 Bujur Timur dan 5000-9000 Lintang Selatan dengan luas wilayah 45.071 Km2 terletak dibagian Selatan Provinsi Papua, memiliki panjang garis pantai 350 Km dan panjang sungai 770 Km serta memiliki rawa seluas 1.425.000 ha.

Kabupaten Merauke di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel, sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Laut Arafura.

Kabupaten Merauke mempunyai kelas ketinggian bervariasi antara 0 sampai dengan 100 m di atas permukaan laut. Suhu udara rata-rata berkisar pada angka 26,70 celcius. Suhu udara maximum 31,00 celcius dan suhu udara minimum 23,20 celcius. Rata-rata curah hujan di Merauke menunjukkan angka 227,7 mm dengan jumlah hari hujan 114 hari.

* 1. **Maksud dan Tujuan**

Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke merupakan gambaran dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban atas kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan dan penyampaian permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahannya selama tahun 2011.

Adapun tujuan dari laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan, untuk nantinya dapat dipakai dalam penentuan arah kebijakan dan perencanaan pengembangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke pada tahun berikutnya.

BAB II

**BIDANG ADMINISTRASI**

**2.1 Organisasi Dinas**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 11 Tahun 2008 Tanggal 21 Oktober 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merauke, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan dan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Kelautan dan Perikanan, pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan sesuai dengan Peraturan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan.

Untuk Penyelenggaraan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
5. Pelayanan teknis administratif; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pembantuan Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar;
2. Terbangunnya Pelabuhan Perikanan Merauke;
3. Tersedianya Kapal Penangkap Ikan;
4. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi, sosialisasi program, lokakarya program dan pendampingan masyarakat pesisir.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke sesuai PP 41 Tahun 2007 terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari :

 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi

 2. Sub Bagian Keuangan

 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

 1. Seksi Pengelolaan Tata Ruang Pesisir dan Laut

 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Ikan

 3. Seksi Penyuluhan

d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

 1. Seksi Teknis Penangkapan Ikan

 2. Seksi Usaha Penangkapan Ikan

 3. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan

e. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

 1. Seksi Tehnik Budidaya Ikan

 2. Seksi Usaha Budidaya Ikan

 3. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan

f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :

 1. Seksi Teknik Pengolahan

 2. Seksi Usaha dan Pemasaran

 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

h. Unsur Jabatan Fungsional

* 1. **Program dan Evaluasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 Tanggal 21 Oktober 2008, Sub Bagian Program dan Evaluasi berada di bawah Sekretariat. Mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan. Hasil kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain :

**A. Laporan Tahunan 2011**

 Laporan tahunan merupakan catatan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang telah berjalan, dengan menyajikan hasil capaian kegiatan yang bersumber dari dana DAU/APBD Kabupaten, OTSUS Papua serta dana Tugas Pembantuan/APBN.

Laporan tahunan juga disusun sebagai dokumentasi program dan kegiatan yang dilaksanakan serta merupakan bahan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam satu tahun anggaran yang telah berjalan untuk menentukan perencanaan kegiatan pembangunan tahun anggaran yang akan datang.

**B. RENSTRA SKPD**

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka mengopersionalkan RPJM Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dengan materi dengan subtansi utama memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan.

Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan ini menselaraskan kebijakan di sektor perikanan dan kelautan dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan serta penetapan RPJM Kebupaten Merauke, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan permasalah-permasalahan yang dihadapi oleh nelayan dan pembudidaya ikan terutama dalam meningkatkan produksi perikanan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan.

Tujuan dari penyusunan Renstra SKPD adalah untuk mempermudah dalam suatu perencanaan pembangunan ke depan hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang ditetapkan dapat berjalan bertahap dan berkelanjutan, sehingga pembangunan ke depan nantinya diharapkan searah dengan Visi dan Misi maupun sasaran yang ingin dicapai.

**C. LAKIP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Idealnya dasar penyusunan LAKIP dari Rencana Strategi SKPD yang disusun dalam 5 ( lima ) tahun ke depan dan biasanya disesuaikan dengan masa jabatan Bupati atau Gubernur.

Tujuan dari penyusunan LAKIP yaitu mengetahui perkembangan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam satu tahun yang nantinya dipakai sebagai koreksi dan acuan untuk tahun berikutnya. Hambatan maupun kegagalan yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak diharapkan terjadi di tahun-tahun berikutnya.

**D. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD**

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD kepala SKPD menyusun RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut di atas, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan usulan program, kegiatan dan anggaran yang diajukan guna dibahas oleh Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif yang selanjutnya setelah ditetapkan maka RKA SKPD tersebut dituangkan kembali didalam DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.

**E. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD**

Setelah peraturan tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan

kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun dan menyampaikan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam penjabaran APBD.

 Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjunya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh pengguna anggaran.

 Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan dokumen program, kegiatan dan biaya yang telah disetujui atau ditetapkan di DPRD yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan dinas dalam satu tahun anggaran (lampiran 1).

* 1. **Keuangan**

Anggaran biaya yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke tahun 2011 sebesar Rp. 32.304.349.575,- (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari :

1. Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 17.155.263.575,40,-
2. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 2.445.600.000,-
3. Sumber Dana Otsus sebesar Rp. 1.100.000.000,-
4. Sumber Dana Luncuran sebesar Rp. 123.620.000,-
5. APBN Sebesar Rp. 11.479.866.000,-

Masing-masing sebagai berikut :

**2.3.1 APBD**

a. Jumlah anggaran sumber Dana Alokasi Umum (DAU) yang dibiayai sebesar Rp. 17.155.263.575,40,- (Tujuh Belas Miliar Seratus Lima Puluh lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Empat Puluh Rupiah) dengan realisasi Rp. 14.428.443.230,- (Empat Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau 84,11% yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

b. Jumlah anggaran sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dibiayai sebesar Rp. 2.445.600.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 2.422.677.728,- (Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan ruipah) atau 99.06% yang terdiri dari belanja langsung.

c. Jumlah anggaran sumber Dana OTSUS yang dibiayai sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu miliar Seratus Juta Rupiah) dengan realisasi Rp. 1.098.092.000,- (Satu Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 99,83% yang terdiri dari belanja langsung.

1. Jumlah anggaran sumber Dana Luncuran yang dibiayai sebesar Rp. 123.620.000,- ( Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu

Rupiah) dengan realisasi Rp. 123.620.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau 100 % yang terdiri dari belanja langsung.

**2.3.2 APBN**

Anggaran pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Merauke selain dari Belanja langsung urusan dari APBD, juga terdapat pada APBN dengan uraian yaitu Anggaran Pembangunan yang berasal dari APBN sebesar Rp. 11.479.866.000,- (Sebelas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Emam Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 11.338.135.200,- (Sebelas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 98.77 % sumber dana berasal dari Rupiah Murni yang terdiri dari 4 kegiatan.

**2.3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 2.563.550.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.346.347.175,- atau 91,53 % (lampiran 3).

**2.3.4 Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke terdiri dari laporan APBD dan APBN dimana laporan keuangan APBD yaitu realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2011, sedangkan laporan keuangan APBN tahun 2011 mencakup laporan rekon (CALK, neraca, dan laporan realisasi anggaran) dan laporan SIMAK-BMN (posisi BMN dineraca, BMN intrakontabel, BMN ekstrakontabel, BMN gabungan intrakontabel dan ekstrakontabel, laporan persediaan dan catatan ringkas BMN). Laporan-laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan

catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

 Laporan keuangan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset daerah, utang, dan ekuitas dana, yang diharapkan dapat berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta memudahkan pengendalian.

**2.4** **Umum dan Kepegawaian**

**2.4.1 Umum**

Di bagian umum, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyelenggaraan pola klasifikasi kearsipan yaitu meliputi kegiatan penerimaan surat masuk dan keluar,

pengetikan, pencatatan, pengiriman, penyimpanan arsip sesuai tata cara kearsipan pemerintah. Selama tahun 2011 kegiatan surat menyurat berjumlah 3.965 surat yang terdiri dari surat masuk 1.506 dan surat keluar 2.459.

Dari surat masuk dan keluar yang di arsipkan dapat di rinci menurut kelompok tata cara kearsipan pemerintah sebagai berikut :

* Surat masuk :
1. Umum 1.039
2. Pemerintahan 78
3. Politik 52
4. Keamanan dan ketetertiban 40
5. Kesejahteraan rakyat 39
6. Perekonomian 70
7. Pekerjaan umum dan ketenagaan 10
8. Pengawasan 28
9. Kepegawaian 45
10. Keuangan 105

**Jumlah 1.506**

* Surat keluar :
	1. Umum 226
	2. Pemerintahan 29
	3. Politik -
	4. Keamanan dan ketetertiban -
	5. Kesejahteraan rakyat 7
	6. Perekonomian 1.655
	7. Pekerjaan umum dan ketenagaan 80
	8. Pengawasan -

9. Kepegawaian 297

 10. Keuangan 165

 **Jumlah 2.459**

**2.4.2. Perlengkapan**

Daftar Barang Inventaris Dinas berupa sarana fisik; sarana mobilitas; alat-lat kantor dan mesin; dan meubelair dapat dilihat pada lampiran 4.

* + 1. **Kepegawaian**

**A. Jumlah Pegawai**

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke sampai akhir tahun 2011 sebanyak 92 orang yang dapat dibedakan berdasarkan :

1. Status kepegawaian :

a. PNS

* Golongan I = -
* Golongan II = 9 orang
* Golongan III = 19 orang
* Golongan IV = 4 orang

b. CPNS = 8 orang

c. Tenaga Honorer = 52 orang

2. Jenis kelamin :

* Laki-laki = 55 orang
* Perempuan = 37 orang

3. Pendidikan terakhir :

PNS ditambah dengan CPNS, Tenaga Honorer

* SLTA = 15 orang
* D3 = 33 orang
* S1/D4 = 42 orang
* S2 = 2 orang

**Pengurangan Pegawai**

Dalam tahun 2011 ini terjadi pengurangan 1 (satu) Pegawai Negeri Sipil Karena Pensiun, dan juga terjadi pengurangan 1 (satu) tenaga Honorer karena meninggal dunia.

**BAB III**

**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 Pelaksanaan Kegiatan APBD**

**3.1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya sebagai berikut :**

* + - * 1. Penyediaan jasa surat menyurat (DAU)
				2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (DAU)
				3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (DAU)
				4. Penyediaan jasa administrasi keuangan (DAU)
				5. Penyediaan jasa kebersihan kantor (DAU)
				6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (DAU)
				7. Penyediaan alat tulis kantor (DAU)
				8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (DAU)
				9. Penyediaan peralatan perlengkapan kantor (DAU)
				10. Penyediaan makanan dan minuman (DAU)
				11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (DAU)
		1. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatanya sebagai berikut :**

Pembangunan Gedung Kantor (DAU)

Pengadaan Meubeler (DAU)

* + 1. **Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatanya sebagai berikut :**
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya (DAU)
	* 1. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatanya sebagai berikut :**
		2. Pendidikan dan Pelatihan Formal (DAU)

**3.1.5 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, kegiatanya sebagai berikut :**

1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir (DAU)
2. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir (OTSUS)
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana KP3K (Pendamping DAK)
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana KP3K (DAK)
5. Coastal Community Empowerment Project (SHARING PROGRAM)-(DAU)

**3.1.6 Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut, kegiatannya sebagai berikut :**

a. Pengawasan sumberdaya perikanan (DAU)

**3.1.7 Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat, kegiatannya sebagai berikut :**

a. Promosi Bidang Kelautan dan Perikanan (DAU)

**3.1.8 Pengembangan Budidaya Perikanan, kegiatannya sebagai berikut :**

* 1. Pengembangan bibit ikan unggul (DAU)
	2. Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Pendamping DAK)
	3. Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)
	4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan (DAU)
	5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan (Pendamping DAK)
	6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan (DAK)

**3.1.5 Pengembangan Perikanan Tangkap, kegiatannya sebagai berikut :**

* + 1. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Merauke (Sharing DAU Murni)
		2. Pengadaan jaring (DAU)
		3. Pengadaan alat-alat perikanan (OTSUS)
		4. Pengadaan Motor Tempel Bagi Nelayan (DAU)

**3.1.6 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan,**

 **kegiatannya sebagai berikut :**

1. Peningkatan sarana dan prasarana Pengolahan (DAU)
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan (DPAL-2010)-(DAK-L)
3. Peningkatan sarana dan prasarana Pengolahan (Pendamping DAK)
4. Peningkatan sarana dan prasarana Pengolahan (DAK)

**3.1.7 Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar,**

 **Kegiatannya sebagai berikut :**

1. Pengkayaan (Restocking) sumberdaya perikanan dan biota air lainnya (DAU)

**3.2 Pelaksanaan Kegiatan APBN**

**3.2.1 Pengembangan Sumber Daya Perikanan, kegiatannya sebagai berikut:**

1. Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBN Ditjen Perikanan Tangkap)
2. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP-TP) (APBN Ditjen Perikanan Tangkap)
3. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) (APBN Ditjen Perikanan Budidaya).
4. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (APBN Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan).

BAB IV

**PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**4.1 PRODUKSI**

Perkembangan produksi ikan di Kabupaten Merauke pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 34.51 %. Pada tahun 2010 produksi perikanan sebesar 55.493.300 Kg, sedangkan pada tahun 2011 produksi perikanan menurun hingga 36.340.305,8 Kg. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah armada penangkapan ikan yang berpangkalan dan melakukan kegiatan bongkar muat ikan di pelabuhan Merauke serta ada beberapa perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi dan dikarenakan cuaca alam yang tidak menguntungkan.

Untuk produksi total hasil perikanan di Kabupaten Merauke tahun 2011 adalah sebesar 36.340.305,8 Kg dan produksi Ikan Hias/Reptil/Amphibi sebesar 7.949.968 Ekor.

**Grafik 1. Total Produksi Hasil Perikanan**

**4.2 Bidang Perikanan Tangkap**

Kabupaten Merauke yang terdiri atas 20 Distrik yaitu Distrik Merauke, Distrik Naukenjerai, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Jagebob, Distrik Sota, Distrik Muting, Distrik Elikobel, Distrik Ulilin, Distrik Kurik, Distrik Animha, Distrik

Malind, Distrik Okaba, Distrik Kaptel, Distrik Ngguti, Distrik Tubang, Distrik Kimaam, Distrik Ilwayab, Distrik Tabonji, dan Distrik Waan memiliki potensi sumberdaya perikanan yang sangat besar baik perikanan laut maupun potensi perikanan tangkap di perairan umum, dimana salah satu potensi perikanan lautnya adalah berasal dari Laut Arafura yang merupakan salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dari 10 WPP yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 995/kpts/IK.210/9/99. Laut ini terletak di Indonesia bagian timur yang secara yuridiksi politik terdiri dari 2 jenis perairan, yaitu perairan teritorial dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Kekayaan sumberdaya ikan strategis, seperti udang, tuna/cakalang, cumi-cumi, ikan demersal dan karang serta bola-bola (teripang) yang melimpah, telah menarik banyak armada penangkapan dari luar kawasan, bahkan dari negara-negara sekitar, untuk beroperasi di wilayah ini. Namun demikian, kenyataan di lapangan saat ini, kondisi Sumberdaya Ikan (SDI) di Laut Arafura cenderung menunjukkan gejala penangkapan berlebih (over fishing). Kegiatan penangkapan ikan selama ini cenderung memandang bahwa SDI adalah kekayaan milik bersama (common property) dan dapat dimanfaatkan tanpa batas (open access) secara perlahan harus mulai ditinggalkan.

Transformasi paradigma tersebut perlu mengedepankan pemanfaatan secara optimal dengan memperhatikan keadilan distribusi pemanfaatan. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang bertanggung jawab ini secara operasional di lapangan memang seringkali mengalami banyak kendala.

Sumberdaya ikan di wilayah perikanan Laut Arafura yang cukup melimpah dan beraneka ragam, bila dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, akan terancam

kelestariannya. Ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan terjadi sebagai akibat dari pelaku usaha yang memanfaatan sumberdaya ikan secara tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dilaporkan dan tidak diatur, atau dikenal dengan istilah *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing.*

Untuk menjaga sumberdaya ikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari, perlu didasarkan pada suatu Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP). Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan kaidah internasional tentang perlunya pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (*Code of Conduct for Responsible Fisheries* dari FAO, 1995).

Pengelolaan sumberdaya ikan harus dilakukan sebaik-baiknya dengan mengacu pada azas keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan ikan serta terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya guna meningkatkan ketahanan nasional.

Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke memiliki tugas meliputi Teknis Penangkapan Ikan, Usaha Penangkapan Ikan, Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan.

**4.2.1 Kebijakan**

Pembangunan Perikanan Tangkap diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, maupun penerimaan bagi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mencapai tujuan tersebut, diterapkan manajemen perikanan tangkap yang terarah dan terpadu, sehingga

diharapkan pemanfaatan sumberdaya ikan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini karena sumberdaya ikan dapat mengalami degradasi bahkan musnah jika dieksploitasi secara tidak terkendali. Yang mana juga hal ini disesuaikan dengan visi dan misi Perikanan Tangkap.

**Visi** Pembangunan Perikanan Tangkap adalah **usaha perikanan tangkap yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempunyai daya saing, serta memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan berkelanjutan**.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam **Misi** Pembangunan Perikanan Tangkap, yakni :

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan;
2. Menjaga kelestarian sumberdaya ikan serta lingkungannya;
3. Membangun usaha perikanan tangkap yang berdaya saing;
4. Meningkatkan peran sub sektor perikanan tangkap terhadap pembangunan perekonomian nasional.

 Dalam mewujdkan visi dan misi perikanan tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dalam hal ini Bidang Perikanan Tangkap, telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program pembangunan Perikanan Tangkap yang dari tahun ke tahun terus dievaluasi kinerja dan efektivitasnya.

**4.2.2 Kegiatan Rutin**

Kegiatan rutin Bidang Perikanan Tangkap yakni menganalisis dan melaksanakan pelayanan perijinan, identifikasi, verifikasi kelayakan usaha di bidang perikanan tangkap serta mengidentifikasi data teknis penangkapan ikan.

Sepanjang tahun 2011 Bidang Perikanan Tangkap telah melakukan pelayanan perijininan berupa :

* Pelayanan Perijinan berupa SKAI (Surat Keterangan Asal Ikan) atau IPKP (Ijin Pengiriman Komoditas Perikanan)
* Pelayanan Perijinan berupa SIUP / SIPI / SIKPI
* Pelayanan Perijinan berupa Rekomendasi

Selain itu bidang Perikanan Tangkap juga telah melakukan survey ke beberapa desa pesisir di Kabupaten Merauke guna mendapatkan data teknis penangkapan ikan.

* + 1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke melalui Bidang Perikanan Tangkap merupakan salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah terbesar bagi Kabupaten Merauke. PAD Bidang Perikanan Tangkap berasal dari Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2007 dan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2011 serta Peraturan bupati No. 6 Tahun 2011.

* Tabel 1. Daftar Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Perda

No. 14 Tahun 2007

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PERIZINAN** | **TARIF** | **SATUAN** |
| 1 | Surat Penangkapan Ikan (SPI)/ Tahun dengan menggunakan alat tangkap :1. Pukat Udang
2. Pukat Ikan
3. Jaring Insang
4. Pancing Rawa Dasar
 | Rp. 110.000,-Rp. 100.000,-Rp. 25.000,-Rp. 20.000,- | / GT/ GT/ GT/ GT |
| 2 | Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sampai dengan 10 GT | Rp. 125.000,- | / GT / Tahun |
| 3 | Surat Keterangan Asal (SKA)1. Udang Segar
2. Ikan Segar/ beku
3. Kepiting (beku)
4. Lain-lain
 | Rp. 250.,-Rp. 125.,-Rp. 250.,-Rp. 250.,- | / Kg/ Kg/ Ekor/ Kg |

* Tabel 2. Daftar Tarif Retribusi Perizinan tertentu Berdasarkan Perda

No. 12 Tahun 2011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis Perizinan** | **TARIF****(Rp)** | **SATUAN** |
| 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Izin Usaha Perikanan
3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Tahun dengan menggunakan alat tangkap:
4. Pukat Udang
5. Pukat Ikan
6. Jaring Ingsang
7. Pancing Rawai Dasar
8. Surat Izin Kapal pengangkut Ikan (SIKPI) sampai dengan 10 GT
 | 1.000.000,-110.000,-100.000,-50.000,-35.000,-150.000,- | /GT/GT/GT/GT/GT/Tahun |

* Tabel 3. Harga Patokan Ikan (HPI) Atas Jenis Ikan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2011

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA IKAN** | **HPI****(RUPIAH / KG)** | **HARGA SATUAN****SKALA BESAR****(2,5 % X HPI)** | **HARGA SATUAN****SKALA KECIL****(1 % X HPI)** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20. | KAKAP *( BARAMUNDI SP*)KAKAP MERAHSENANGIN (KURO)GULAMAHBAWALKUWE/BUBARAGEROTKERAPULANDOKLASSYMANYUNGREMANGTENGGIRIKEMBUNGLAYANGLAYURIKAN CAMPURANCUMI –CUMIUDANGBIOTA LAINNYA | 10.000,-15.000,-10.000,-10.000,-10.000,-9.000,-7.000,-10.000,-10.000,-7.000,-7.000,-7.000,-12.000,-7.000,-7.000,-10.000,-10.000,-15.000,-25.000,- 10.000,- | 250375250250250225175250250175175175300175175250250375625250 | 10015010010010090701001007070701207070100100150250100 |

Berdasarkan dasar di atas, Total PAD Bidang Perikanan Tangkap sepanjang tahun 2011 yang sudah kami setorkan pada Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Merauke adalah sebesar Rp 1.370.639.237,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). (Data terlampir).

* + 1. **Data Statistik Perikanan Tangkap**

Bidang Perikanan Tangkap telah melakukan beberapa survey dan pendataan ke beberapa desa pesisir di Kabupaten Merauke namun belum semua desa pada Distrik pesisir terjangkau. Ini dikarenakan biaya serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

 Desa-desa yang selama tahun 2011 telah didata adalah Desa Onggari, Desa Samkai, dan Desa Urumb. Hasil produksi lokal pada tahun 2011 dari ketiga Desa tersebut adalah sebesar 537.623 Kg

**4.2.3 Produksi Perikanan Tangkap**

Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 34.51 %. Pada tahun 2010 produksi perikanan sebesar 55.493.300 Kg, sedangkan pada tahun 2011 produksi perikanan menurun hingga 36.340.305,8 Kg.

Data produksi Perikanan Tangkap berdasarkan data expor sebesar 33.795.740 Kg, data antar pulau sebesar 2.634.556 Kg.

Grafik 2. Perkembangan data produksi tahun 2010-2011

**4.2.4 Sarana dan Prasarana**

**A. Armada Perikanan Tangkap**

Jumlah armada perikanan laut tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2009 sejumlah 1.210 buah sedangkan pada tahun 2010 jumlah armada sebanyak 1.258 buah. Untuk lebih jelasnya perkembangan armada dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perkembangan Armada Perikanan Laut di Kabupaten Merauke

tahun 2009-2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis Armada | 2010(buah) | 2011(buah) | Persentase |
| Naik (%) | Turun (%) |
| Perahu papan kecilPerahu papan sedangPerahu papan besarMotor tempelKapal motor 0-10 GTKapal motor 10-30 GTKapal motor 30-50 GTKapal motor 50-100 GTKapal motor >100 GT | 186214158349114122191482 | 186214158369114123191488 | 61 |  |
| Jumlah | **1.258** | **1.278** | 7 |  |

Grafik 3. Jumlah Armada Perikanan

**B. Alat Tangkap**

Prasarana dan sarana penangkapan ikan (alat tangkap) yang dominan digunakan nelayan di Kabupaten Merauke adalah Pukat Ikan, Pukat Udang, Pukat Pantai, Jaring Insang Hanyut, Jaring Insang Tetap, Serok, Pancing, Bubu, Jala dan Tramell Net. Jumlah alat tangkap tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2010 adalah sebanyak 35.929 unit sedangkan pada tahun 2011 jumlah alat tangkap sebanyak 35.929 unit. Untuk lebih jelasnya perkembangan alat tangkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Perkembangan Alat Tangkap di Kabupaten Merauke tahun 2009-2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis Alat Tangkap | 2010(unit) | 2011(unit) | Persentase |
| Naik (%) | Turun (%) |
| Pukat IkanPukat UdangPukat PantaiJaring Insang HanyutJaring Insang TetapSerokPancingBubuJalaTramell Net | 71945217.9588.6761.0535.5132896481.260 | 71945219.3129.0761.0535.5132897501.260 | 7,544,6115,74 |  |
| **Jumlah** | **35.929** | **37.785** | 5,17 |  |

Grafik 4. Jumlah Alat Tangkap Ikan

**4.2.5 KEGIATAN PEMBANGUNAN/ PENGADAAN DAN PENINGKATAN USAHA MASYARAKAT PESISIR**

Kegiatan pembangunan/pengadaan dan peningkatan usaha masyarakat pesisir pada bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan DPA dan DIPA Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang sudah terealisasi adalah sebagai berikut:

1. Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Merauke yang bersumber dari dana APBN, DAU – Multiyears.
2. Pengadaan Alat-alat Perikanan (berupa jaring ikan **mata 3** sebanyak **200 unit**, **mata 4** sebanyak **200 unit**, **mata 7** sebanyak **592 unit**, **mata 10** sebanyak **562 unit**, **Jala** sebanyak **102 unit** dan **Jaring Udang/Gillnet mata 2 ¼** sebanyak **200 unit**) yang bersumber dari Dana DAU dan Dana OTSUS Tahun 2011 telah terealisasi 100% dan telah didistribusikan ke kampung tujuan masing- masing (Kampung Yowied, Tabonji, Yamuka, Sabon, Tor, Turiram, Kumbis, Wanam, Torai, Erambu, Kumbe, Wasur, Maro, Nasem, Tomerau, Tomer, Urumb, Buti, Dokip, Wamal, Waan, Konorau, dan Kladar).
3. Pengadaan **Motor Tempel 15 PK** dan **40 PK** masing – masing **10 unit** bagi nelayan yang bersumber dari Dana DAU Tahun 2011 telah terealisasi 100% dan telah didistribusikan ke kampung tujuan masing – masing (Kampung Torai, Erambu, Kumbe, Wasur, Maro, Nasem, Tomerau, Tomer, Urumb, Buti, Dokip, Wamal, Waan, Konorau, dan Kladar).
4. Kegiatan Peningkatan Ekomoni Masyarakat Pesisir melalui Dana Bantuan langsung Masyarakat / BLM PUMP yang bersumber dari dana APBN melalui Pemerintah Propinsi Papua dan telah terealisasi 100% kepada 8 Kelompok Usaha Bersama (KUB Payum I, KUB Payum II, KUB Payum III, KUB Onggari I, KUB Onggari II, KUB Bombang Laut, KUB Bina Nelayan Sejahtera dan KUB Bina Baru) yang masimg – masing kelompok menerima bantuan dana sebesar 100 Juta Rupiah.

Alokasi dana APBN kepada masing-masing Kelompok di kabupaten Merauke yang menerima BLM PUMP-Perikanan Tangkap tahun 2011, dana tersebut dimanfaatkan oleh kelompok secara swakelola sesuai dengan rencana usaha kelompok dalam proposal yang diberikan pada tim teknis PUMP-Perikanan Tangkap Dinas Kelutan dan Perikanan Kabupaten Merauke.

Penggunaan dana BLM PUMP-Perikanan Tangkap oleh Kelompok Usaha Bersama dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

|  |
| --- |
| **TABEL 6.** **RINCIAN REALISASI DANA BLM PUMP PERIKANAN TANGKAP** **KABUPATEN MERAUKE TA. 2011** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **No.**  | **Nama Kelompok** | **Pencairan Dana Terakhir** |  **Jumlah Dana (Rp)**  | **Nilai Pembelanjaan (Rp)** | **Sisa Dana (Rp)** |  **Persentase Belanja (%)**  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Payum I | 10 Oktober - 10 Januari 2012 |  100.000.000  |  95.301.000  |  4.699.000  |  95,30  |
| 2 | Payum II | 10 Oktober - 10 Januari 2012 |  100.000.000  |  94.808.000  |  5.192.000  |  94,81  |
| 3 | Payum III | 10 Oktober - 21 Desember 2011 |  100.000.000  |  83.033.000  |  16.967.000  |  83,03  |
| 4 | Onggari I | 02 November - 09 Desember 2011 |  100.000.000  |  89.220.000  |  10.780.000  |  89,22  |
| 5 | Onggari II | 06 Oktober - 09 Desember 2011 |  100.000.000  |  80.335.000  |  19.665.000  |  80,34  |
| 6 | Bombang Laut | 11 Oktober - 21 Desember 2011 |  100.000.000  |  84.024.000  |  15.976.000  |  84,02  |
| 7 | Bina Nelayan Sejahtera | 11 Oktober - 21 Desember 2011 |  100.000.000  |  82.780.000  |  17.220.000  |  82,78  |
| 8 | Bina Baru | 11 Oktober - 21 Desember 2011 |  100.000.000  |  88.288.000  |  11.712.000  |  88,29  |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **TOTAL** | **800.000.000**  |  **697.789.000**  | **102.211.000**  |  **87,22**  |

Tabel 7. Pemanfaatan Dana BLM PUMP-Perikanan Tangkap

 KUB. Bina Nelayan Sejahtera.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan Dana** | **Jumlah Dana yang Dibelanjakan****(Rp)** |
|
| 1 | Pembelian Jaring Udang Sapurata | 4.800.000 |
| 2 | Pembelian Bahan Pembuatan Jaring | 75.230000 |
| 3 | Mobilisasi | 2.750.000 |
| 4 | Biaya Operasional | 17.220.000 |
| **TOTAL DANA** | **100.000.000** |

Tabel 8. Pemanfaatan Dana BLM PUMP-Perikanan Tangkap

 KUB. Bina Biru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan Dana** | **Jumlah Dana yang Dibelanjakan****(Rp)** |
|
| 1 | Pembelian Bahan Pembuatan Jaring | 83.928.000 |
| 2 | Upah Kerja Penjahit Jaring | 1.610.000 |
| 3 | Mobilisasi | 2.750.000 |
| 4 | Biaya Operasional | 11.712.000 |
| **TOTAL DANA** | **100.000.000** |

Tabel 9. Pemanfaatan Dana BLM PUMP-Perikanan Tangkap

 KUB. Bombang Laut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan Dana** | **Jumlah Dana yang Dibelanjakan****(Rp)** |
|
| 1 | Pembelian Jaring Udang Sapurata | 21.600.000 |
| 2 | Pembelian Bahan Pembuatan Jaring | 59.674.000 |
| 3 | Mobilisasi | 2.750.000 |
| 4 | Biaya Operasional | 15.976.000 |
| **TOTAL DANA** | **100.000.000** |

Tabel 10. Pemanfaatan Dana BLM PUMP-Perikanan Tangkap

 KUB. Payum I.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan Dana** | **Jumlah Dana yang Dibelanjakan****(Rp)** |
|
| 1 | Pembelian Jaring | 20.231.000 |
| 2 | Pembelian Bahan Pembuatan Jaring | 59.820.000 |
| 3 | Biaya Pengikatan Jaring | 10.000.000 |
| 4 | Mobilisasi | 2.750.000 |
| 5 | Biaya Operasional | 4.699.000 |
| **TOTAL DANA** | **100.000.000** |

Tabel 11. Pemanfaatan Dana BLM PUMP-Perikanan Tangkap

 KUB. Payum II.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan Dana** | **Jumlah Dana yang Dibelanjakan****(Rp)** |
|
| 1 | Pembelian Bahan Pembuatan Jaring | 90.858.000 |
| 2 | Biaya Pengikatan Jaring | 1.200.000 |
| 3 | Mobilisasi | 2.750.000 |
| 4 | Biaya Operasional | 5.192.000 |
| **TOTAL DANA** | **100.000.000** |

Tabel 12. Pemanfaatan Dana BLM PUMP-Perikanan Tangkap

 KUB. Payum III.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan Dana** | **Jumlah Dana yang Dibelanjakan****(Rp)** |
|
| 1 | Pembelian Bahan Pembuatan Jaring | 80.283.000 |
| 2 | Mobilisasi | 2.750.000 |
| 3 | Biaya Operasional | 16.967.000 |
| **TOTAL DANA** | **100.000.000** |

Tabel 13. Pemanfaatan Dana BLM PUMP-Perikanan Tangkap

 KUB. Onggari I.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan Dana** | **Jumlah Dana yang Dibelanjakan****(Rp)** |
|
| 1 | Pembelian Bahan Pembuatan Jaring | 79.220.000 |
| 2 | Pembelian Cool Box | 4.000.000 |
| 2 | Mobilisasi | 6.000.000 |
| 3 | Biaya Operasional | 10.780.000 |
| **TOTAL DANA** | **100.000.000** |

Tabel 14. Pemanfaatan Dana BLM PUMP-Perikanan Tangkap

 KUB. Onggari II.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan Dana** | **Jumlah Dana yang Dibelanjakan****(Rp)** |
|
| 1 | Pembelian Bahan Pembuatan Jaring | 70.435.000 |
| 2 | Pembelian Cool Box | 3.900.000 |
| 2 | Mobilisasi | 6.000.000 |
| 3 | Biaya Operasional | 19.665.000 |
| **TOTAL DANA** | **100.000.000** |

**4.2.6 Permasalahan dan Kendala**

 Kabupaten Merauke termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Nelayan yang merupakan pelaku perikanan sendiri keadaannya masih jauh dari kesejahteraan. Bidang

Perikanan Tangkap memiliki kendala dalam hal pendataan dan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka mengetahui jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dalam hal pendanaan yang menyebabkan pendataan dan pembinaan terhadap masyarakat nelayan diseluruh Distrik pesisir tidak dapat terlaksana. Kedepannnya untuk tahun 2012 dimohon dukungan dana

agar pelaksanaan pendataan dan pembinaan dalam rangka pembuatan ‘data base’ perikanan tangkap dapat terlaksana serta dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh Rumah Tangga Perikanan Tangkap.

**4.3 Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah merupakan suatu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun kegiatan yang terdapat pada Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan baik yang bersifat rutinitas maupun yang sifatnya penunjang adalah merupakan semua kegiatan yang bertujuan untuk menuju kepada pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011-2015, sebagaimana telah dijabarkan melalui sejumlah program baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan.

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (*Fisheries management*) merupakan proses yang sangat kompleks, memerlukan integrasi sumberdaya biologi dan ekologi, dengan faktor-faktor sosial-ekonomi dan kelembagaan berpengaruh terhadap perilaku nelayan dan pengambil kebijakan. Tujuan pengelolaan adalah terwujudnya kelestarian sumberdaya ikan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Namun demikian kelestarian merupakan hal yang sulit dicapai, populasi ikan makin terbatas, hasil tangkapan dunia makin sedikit dan hampir 70 % stok ikan di seluruh dunia mengalami penurunan, karena dieksploitasi penuh atau over eksploitation lebih. Pengaturan pengelolaan secara konvensional seperti pembatasan ukuran alat penangkapan atau pembatasan *effort*, telah digunakan untuk mengembalikan stok, mengurangi mortalitas ikan dan meningkatkan stock pemijahan. Ketidakpastian dalam perkiraan stock, peningkatan kekuatan penangkapan (*Fishing Power*) secara dramatis dan pilihan intertemporal berakibat jatuhnya beberapa stok ikan, menjadi pertanyaan kenapa pengelolaan gagal.

Sumberdaya ikan di Laut Arafura pada Tahun 2004 dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah mengalami overfishing yang ditunjukkan dengan indikasi makin lamanya rata-rata hari operasi melaut, menurunnya jumlah tangkapan rata-rata, dan makin kecilnya ukuran udang dan ikan yang ditangkap. Terjadinya *overfishing* tersebut diduga disebabkan oleh beberapa hal antara lain kurang

efektifnya manajemen pengelolaan sumber daya ikan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sepenuhnya berdasarkan pada input kontrol; lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut terhadap kegiatan penangkapan,

sehingga peraturan dan regulasi kurang ditaati pelaku; kurangnya kesadaran para pelaku terhadap prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan yang lestari dan

bertanggungjawab (*Code of Conduct for responsible fisheries*); kurangnya sarana dan prasarana pengawasan serta rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Pengawas.

Menyikapi kondisi tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke khususnya pada bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mencegah dan mengurangi kegiatan yang sifatnya *Illegal*, *Unrepoerted and Unregulated Fishing* (*I-UU Fishing*). Seperti pengawasan dalam pelaksanaan eksplotasi sumberdaya ikan di Laut Arafura, pemantauan terhadap kegiatan Bongkar Muat (*Loading*), Pemantauan terhadap data teknis dan administrasi kapal-kapal yang

melakukan penangkapan ikan di laut Arafura, pemberdayaan masyarakat Pesisir dan

sebagainya. Disamping itu pula Dinas Kelautan dan Perikanan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dengan harapan akan membantu mensejahterakan masyarakat.

**4.3.1 Kebijakan**

Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Merauke maka Dinas Kelautan dan Perikanan terutama pada bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penataan / pengelolaan Potensi Sumberdaya ikan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan dengan mengacu pada kode etik pengelolaan Sumberdaya Ikan yaitu *Code of Conduct for resposible fisheries* (CCRF).
2. Meningkatkan kompetensi Sumberdaya Aparatur pengawas, Penyuluh dan pendamping menjadi insan yang Berkualitas, Kreatif dan innovatif.
3. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap eksploitasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
5. Pengelolaan Lingkungan yang berbasis pada Pemberdayaan Masyarakat
6. Mitigasi bencana alam

**4.3.2 Kegiatan Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Kegiatan yang terdapat pada Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke baik yang bersifat rutinitas maupun yang sifatnya temporer adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk menuju kepada pencapaian kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan diatas, walaupun belum semua kegiatan tersebut dapat merealisasikan kebijakan tersebut diatas oleh karena berbagai kendala.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

1. Sumber Dana DAK

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam rangka mendukung rencana kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana KP3K (pembangunan tambatan kapal/perahu di kampung Kawe Distrik Waan).

1. Sumber Dana DAU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam rangka mendukung rencana kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan Pos Penyuluh di Distrik Waan dan Distrik Kimaam).

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut dalam rangka mendukung kegiatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan.

1. Sumberdana OTSUS

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam rangka mendukung KegiatanPembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir di Distrik Naukenjerai dan Distrik Merauke.

Sedangkan kegiatan bongkar muat (loading) di Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2011 terdapat 3 perusahaan yang aktif dalam kegiatan perikanan. Adapun nama perusahaan tersebut yaitu : PT. Tri Kusuma Graha, PT. Dwi Karya Reksa Abadi, PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing.

**4.4 Bidang Perikanan Budidaya**

Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten dari 26 kabupaten di Propinsi Papua, yang terletak di bagian selatan Pulau Papua. Memiliki luas wilayah mencapai 45.071 Km2, panjang garis pantai 350 km, panjang sungai 770 km dan rawa seluas 1.425.000 ha serta memiliki hutan mangrove seluas 99.974 ha. Kabupaten Merauke terletak antara 1370 – 1410 Bujur Timur dan 50 – 90 Lintang Selatan. Kabupaten Merauke di Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digul, Sebelah Timur berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG) dan di Sebelah Barat serta Selatan berbatasan dengan Laut Arafura.

Kondisi Kabupaten Merauke sebagaimana terpotret di atas memiliki potensi sumberdaya perikanan budidaya yang besar, hal ini terlihat dengan terdapatnya beberapa komoditas spesifik lokal yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti Udang Galah (*Macrobrachium rosenbergii*), Ikan Arwana (*Schlerropages jardinii*), ikan kakap putih (*Lates calcariver/baramundi*), Udang Lobster air tawar (*Cherax albertisii* dan *Cherax zebra)* dan Bambit (*Selanota multifasciata*), Kepiting Bakau (*Scylla cerata*), Kura-kura, Rainbow, Ikan Kaca dan kodok. Selain dari pada itu terdapat berbagai jenis komoditas ikan air tawar yang terintroduksi seperti ikan nila, mas, gurami, patin, lele dumbo, dan lain-lain yang prospek pengembangannya sangat menjanjikan karena memiliki pangsa pasar yang luas.

Dalam konteks ketersediaan dan kesesuaian lahan untuk pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Merauke juga sangat menjanjikan. Hal ini terlihat dengan adanya potensi lahan pengembangan perikanan budidaya yakni seluas 666.142 ha yang terdiri dari lahan perikanan budidaya air tawar seluas 608.242 ha dan lahan perikanan budidaya air payau seluas 57.900 ha. (dasar perhitungan luas lahan yakni berdasarkan estimasi luas rawa keselurhan diambil 40% ; panjang pantai 30% ; panjang sungai 30% dan luas sawah 30% untuk mina padi serta luas long storage 60% untuk budidaya dalam keramba apung).

Dari potensi lahan yang ada telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya air tawar seluas 26,56 ha dan untuk kegiatan budidaya air payau seluas 1,5 ha. Pemanfaatan lahan untuk budidaya di air tawar naik 0.0043 % dan pemanfaatan lahan budidaya di air payau turun menjadi 0.0025 % hal tersebut dikarenakan adanya peralihan pemanfaatan lahan pemeliharaan komoditas air payau yang dimafaatkan untuk pemeliharaan komoditas air tawar.

Program Perikanan Budidaya Kabupaten Merauke tahun 2011 pada prinsipnya semuanya dapat berjalan sesuai tujuan dan sasaran serta target yang diharapkan

baik itu kegiatan rutin maupun keproyekan. Program saat ini masih menitik beratkan kepada pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan pemula (khususnya masyarakat lokal) yang pada hakekatnya diarahkan pada peningkatan kemandirian usaha masyarakat, peningkatan sumberdaya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam, dan memperkuat kelembagaan usaha masyarakat pembudidaya ikan.

**4.4.1 Uraian Kegiatan Rutin dan Pembangunan**

1. **Rutin**

Kegiatan Rutin Bidang Perikanan Budidaya pada tahun 2011 ini, lebih banyak pada pelayanan bagi masyarakat pembudidaya ikan dan pelaku usaha (penampung ikan hias). Bentuk pelayanan bagi masyarakat pembudidaya ikan, berupa pembinaan dan pendampingan teknis disesuaikan dengan permintaan yang disampaikan oleh pembudidaya ikan. Sedangkan bentuk pelayanan bagi pelaku usaha dalam hal ini para pengusaha penampung ikan hias yang ada di Kabupaten Merauke, yaitu melalui pengurusan surat-surat ijin pengiriman ikan hias (surat SIUP, IPKP dan SKAI) serta melakukan pengawasan langsung saat pengepakan ikan sebelum pengiriman dilaksanakan.

Kegiatan pembinaan dan pendampingan teknis bagi masyarakat pembudidaya ikan yang berada di Kabupaten merauke, dilaksanakan pada beberapa Distrik diantaranya Distrik Merauke, Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, Animha, Nokenjerai, Jagebob, Eliglobel, Tubang, Ilwayab, Kimaam, Wan, Tubang, Okaba dan Muting. Dari pendataan stastistik perikanan budidaya diperoleh jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (RTPI) sebanyak 314 unit dan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) sebanyak 10 unit. Secara lengkap data produksi RTPI dan UPR dapat dilihat pada Lampiran 15 dan 16.

Dalam pelayanan kepada pengusaha penampung ikan hias selama tahun 2011, tercatat telah diterbitkan 16 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), 1 Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI) dan total pengiriman jenis ikan hias sebanyak 7.785.058 ekor (jenis arwana sebanyak 144.341 ekor, jenis non arwana sebanyak 7.623.150 ekor, jenis reptil sebanyak 57 ekor dan jenis amphibi sebanyak 17.510 ekor). Data realisasi pengiriman ikan dan penjualan benih BBIL sebagai sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD), lebih jelas dilihat pada lampiran 17.

Selain kegiatan rutin dalam pelayanan kepada masyarakat pembudidaya ikan dan pengawasan pengiriman ikan hias, bidang perikanan budidaya melakukan fungsi

kontrol pada Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Wasur. Dimana BBIL Wasur adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Merauke, yang berfungsi sebagai penyedia benih ikan dan induk unggul dalam upaya pelayanan kepada masyarakat pembudidaya ikan.

BBIL Wasur telah memberikan kontribusi terhapat PAD yang di hasilkan Bidang Perikanan Budidaya dari hasil penjualan benih. Di tahun 2011 ini, BBIL Wasur telah menjual ikan nila sebanyak 95.096 ekor dan ikan mas sebanyak 69.814 ekor. Total benih ikan nila dan ikan mas yang telah dijual sebanyak 164.910 ekor, serta memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp. 112.920.300,-. Data produksi dan penjualan benih ikan serta daftar sarana dan prasarana di Balai Benih Ikan lokal (BBIL) Wasur, dapat dilihat pada lampiran 18 dan 19

Pada tahun 2011, BBIL Wasur mentargetkan produksi benih ikan nila sebanyak 400.000 ekor, ikan mas sebanyak 240.000 ekor, ikan lele sebanyak 350.000 ekor dan udang galah sebanyak 50.000 ekor. Namun produksi benih pada tahun 2011 belum tercapai dikarenakan terkendala oleh faktor non teknis dan teknis, sehingga produksi benih ikan nila pada tahun 2011 sebanyak 212.755 ekor dan produksi ikan mas sebanyak 154.982 ekor. Untuk produksi benih ikan lele dan udang galah di tahun 2011 belum ada, dikarenakan induk lele yang tersedia masih kategori calon induk, sedangkan udang galah masih terkendala oleh permasalahan teknis produksi (kondisi alam/iklim yang belum menunjang dalam kegiatan produksi).

1. **Pembangunan**

Kegiatan pembangunan bidang perikanan budidaya pada tahun 2011, terbagi menjadi 3 sub kegiatan berdasarkan sumber dana yang digunakan. Dalam hal ini, 3 sub kegiatan yang dimaksud yaitu kegiatan keproyekan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dari dana APBN dan Kegiatan pembagian paket ikan untuk UPR dan RTP dari dana dekonsetrasi Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Papua. Uraian setiap sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. **Kegiatan Keproyekkan dari dana DAK dan DAU**

Adapun kegiatan proyek yang dilaksanakan melalaui DAK dan DAU, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15. Uraian kegiatan proyek dari dana DAK dan DAU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Sumber Dana** | **Uraian Kegiatan Proyek** |
| 1 | DAK | 1. Pengadaan kendaraan roda empat untuk pengangkutan induk dan benih
2. Pengadaan kendaraan roda dua untuk operasional BBIL
3. Pengadaan kendaraan roda dua untuk petugas stastistik
4. Pengadaan laptop
5. Pengadaan printer
6. Pengadaan kamera digital
 |
| 2 | DAU(belanja modal) | * 1. Pengadaan pompa air
	2. Pengadaan mesin potong rumput
	3. Pengadaan alat pengukur pH air dan pompa aerasi
	4. Pembuatan instalasi aerasi
	5. Pemasangan plastik di jendela bangsal udang
	6. Pengadaan induk udang galah dan ikan untuk bantuan pokdakan kelurahan samkai
	7. Pengadaan peralatan produksi (bak fiber glass, tabung oksigen, selang aerasi, selang air, aerator, pompa filter dan alkon)
	8. Pengadaan mesin pakan ikan kapasitas 1 ton / hari
	9. Pembangunan kolam pendederan ukuran 10 x 20 m sebanyak 2 unit dan ukuran 15 x 15 m sebanyak 2 unit
	10. Pembuatan pintu pengeluaran kolam sebanyak 4 unit
	11. Pembuatan atap penutup bak filter
	12. Penataan kolam/galian masyarakat kelurahan samkai
	13. Kegiatan restocking di distrik merauke, semangga, tanah miring dan jagebob
 |

1. **Kegiatan PUMP-PB dari dana APBN**

 Pelaksanaan Kegiatan PUMP-PB oleh Bidang Perikanan Budidaya, di awali dengan pembentukan Tim Teknis PUMP-PB melalui SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke nomor 602/0374 tanggal 30 Maret 2011. Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim teknis ditetapkan ada 4 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang menerima dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PUMP-PB tahun 2011, nama pokdakan penerima dana BLM PUMP-PB di Kabupaten Merauke, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 16. Nama Kelompok Pembudidaya Ikan (pokdakan) penerima BLM PUMP-PB Tahun 2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pokdakan** | **Alamat Pokdakan** | **Titik****Koordinat** |
| **Kampung** | **Distrik** |
| 1 | Pokdakan Kaisa  | Kaisa | Animha | 07042'28,2" LS140031'38,4"BT |
| 2 | Pokdakan Wayau | Wayau | Animha  | 07058'25,0" LS140027'51,2"BT |
| 3 | Pokdakan Rawa Jadi 01 | Wonorejo | Kurik | 08017'26,3" LS140016'41,7"BT |
| 4 | Pokdakan Rawa Jadi 02 | Wonorejo | Kurik | 08018'23,8" LS140016'50,6"BT |

Alokasi dana APBN kepada masing-masing pokdakan di Kabupaten Merauke yang penerima BLM PUMP-PB tahun 2011, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah). Dana tersebut dimanfaatkan oleh pokdakan secara swakelola sesuai dengan rencana usaha kelompok yang buat oleh pokdakan, dalam proposal usaha yang di berikan pada tim teknis PUMP-PB Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.

Penggunaan dana BLM PUMP-PB oleh setiap pokdakan, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 17. Pemanfaatan Dana BLM PUMP-PB Tahun 2011 pokdakan Rawajadi 01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan Dana** | **Jumlah Dana yang Dibelanjakan****(Rp)** |
|
| 1 | Pembuatan dan penataan kolam | 32.340.000 |
| 2 | Pembelian peralatan pendukung operasional budidaya | 16.010.000 |
| 3 | Pembelian benih ikan nila | 12.350.000 |
| 4 | Pembelian pakan ikan | 32.840.000 |
| 5 | Pembelian pupuk | 1.830.000 |
| 6 | Pembelian kapur | 2.470.000 |
| 7 | Operasional BBM | 2.160.000 |
| **TOTAL DANA** | **100.000.000** |

Tabel 18. Pemanfaatan Dana BLM PUMP-PB Tahun 2011 pokdakan Rawajadi 02

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan Dana** | **Jumlah Dana yang Dibelanjakan****(Rp)** |
|
| 1 | Pembuatan dan penataan kolam | 32.340.000 |
| 2 | Pembelian peralatan pendukung operasional budidaya | 16.010.000 |
| 3 | Pembelian benih ikan nila | 12.350.000 |
| 4 | Pembelian pakan ikan | 32.840.000 |
| 5 | Pembelian pupuk | 1.830.000 |
| 6 | Pembelian kapur | 2.470.000 |
| 7 | Operasional BBM | 2.160.000 |
| **TOTAL DANA** | **100.000.000** |

Tabel 19. Pemanfaatan Dana BLM PUMP-PB Tahun 2011 pokdakan Wayau

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan Dana** | **Jumlah Dana yang Dibelanjakan****(Rp)** |
|
| 1 | Pembuatan KJA | 34.526.000 |
| 2 | Pembelian peralatan pendukung operasional budidaya | 4.634.000 |
| 3 | Pembelian net KJA | 23.225.000 |
| 4 | Pembelian pakan ikan | 18.715.000 |
| 5 | Pembelian benih ikan nila | 16.200.000 |
| 6 | Operasional BBM | 2.700.000 |
| **TOTAL DANA** | **100.000.000** |

 Tabel 20. Pemanfaatan Dana BLM PUMP-PB Tahun 2011 pokdakan Kaisa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan Dana** | **Jumlah Dana yang Dibelanjakan****(Rp)** |
|
| 1 | Pembuatan KJA | 34.526.000 |
| 2 | Pembelian peralatan pendukung operasional budidaya | 4.634.000 |
| 3 | Pembelian net KJA | 23.225.000 |
| 4 | Pembelian pakan ikan | 18.715.000 |
| 5 | Pembelian benih ikan nila | 16.200.000 |
| 6 | Operasional BBM | 2.700.000 |
| **TOTAL DANA** | **100.000.000** |

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Mina pedesaan Perikanan budidaya (PUMP-PB) tahun 2011 di Kabupaten Merauke, telah terrealisasi 100 % dan berjalan lancar walaupun dalam pelaksanaannya dengan kondisi seadanya dan rentang waktu yang sempit. Semua Pokdakan Penerima dana PUMP-PB tahun 2011 sangat apresiasi terhadap bantuan yang diberikan, dan berharap tetap mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke khususnya Bidang Perikanan Budidaya. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang terdaftar pada tahun 2011, dapat dilihat pada lampiran 20.

* + 1. **Kegiatan pembagian paket ikan untuk UPR dan RTP dari dana dekonsetrasi Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Papua**

Bantuan paket ikan yang diberikan kepada Unit Perbenihan Rakyat (UPR), adalah paket calon induk ikan mas, ikan nila, dan ikan lele. Daftar UPR penerima paket bantuan calon induk dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21. Daftar UPR penerima paket bantuan Calon induk dari dinas kelautan dan perikanan Propinsi Papua

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA UPR** | **ALAMAT UPR** | **PAKET YANG DITERIMA** |
| 1 | UD. Mas Gurami(Martinus Rumlus) | Jl. Raya Mandala, Kelurahan Merauke | 1 paket calon induk ikan mas |
| 2 | Nikolaus Tjong | Jl. Ahmad Yani,Kelurahan Merauke | 1 paket calon induk ikan mas |
| 3 | Sumber Mulya(Romli) | Kampung Sumber Mulya, Kurik VI | ½ paket calon induk ikan nila |
| 4 | Salor Lestari(Sugeng Iriyanto) | Kampung Salor Indah, Salor II, Kurik | ½ paket calon induk ikan nila |
| 5 | Jaya Makmur(Wangsa) | Kampung Jaya Makmur, Kurik IV | 1 paket calon induk ikan nila |
| 6 | Lele Lestari(Amari Sugianto) | Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Merauke | 2 paket calon induk lele |
| 7 | Suka Maju(Marsimin) | Kampung Suka Maju Distrik Malind | 1 paket calon induk lele |
| 8 | Candra Jaya(Sukamto) | Kampung Candra JayaDistrik Kurik | 1 paket calon induk lele |

Sedangkan bantuan paket ikan yang dterima oleh Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (RTPI), adalah paket benih ikan nila, benih ikan mas dan pakan ikan. Daftar RTPI penerima paket bantuan benih ikan dan pakan ikan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Daftar RTPI penerima paket bantuan benih ikan dan pakan ikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA RTPI** | **ALAMAT RTPI** | **BANTUAN YANG DITERIMA** |
| 1 | Sumarji | SP 6, Jalur 7, Distrik tanah miring | 6.200 benih ikan mas, 6.600 benih ikan nila dan pakan ikan 4 zak |
| 2 | Kuryadi | SP 6, Jalur 5, Distrik tanah miring | 6.200 benih ikan mas, 6.600 benih ikan nila dan pakan ikan 4 zak |
| 3 | Markus Saraun | Jl. Perikanan darat, RT.4, Kelurahan kelapa lima | 6.200 benih ikan mas, 6.600 benih ikan nila dan pakan ikan 4 zak |
| 4 | Paskalis Ambun | Jl. Perikanan darat, RT.4, Kelurahan kelapa lima | 6.200 benih ikan mas, 6.600 benih ikan nila dan pakan ikan 4 zak |
| 5 | Oky W. Prasetya | Jl. Trans Irian, Wasur II, Gang blewah, Kelurahan Rimba Jaya | 6.200 benih ikan mas, 6.600 benih ikan nila dan pakan ikan 4 zak |
| 6 | Slamet | SP 4, Jalur 1, Distrik tanah miring | 6.200 benih ikan mas, 6.600 benih ikan nila dan pakan ikan 4 zak |
| 7 | Misidi | SP 6, Jalur 2, Distrik tanah miring | 6.200 benih ikan mas, 6.600 benih ikan nila dan pakan ikan 4 zak |
| 8 | Donatus Ndiken | SP 7, Jalur 3, Distrik tanah miring | 6.200 benih ikan mas, 6.600 benih ikan nila dan pakan ikan 4 zak |
| 9 | Mujiono | SP 9, Jalur 1, Distrik tanah miring | 6.200 benih ikan mas, 6.600 benih ikan nila dan pakan ikan 4 zak |
| 10 | Sahuri | SP 9, Jalur 2, Distrik tanah miring | 6.200 benih ikan mas, 6.600 benih ikan nila dan pakan ikan 4 zak |

**4.4.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI SELAMA PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan semua kegiatan di Bidang Perikanan Budidaya, tidak terlepas oleh adanya kendala atau masalah yang secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja. Oleh karena itu bersama ini disampaikan beberapa permasalahan beserta solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Permasalahan dan solusi dalam kegiatan Bidang Perikanan Budidaya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Permasalahan** | **Solusi** |
| 1 | Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pembudidayaan ikan mulai dari persiapan tempat/wadah, pemeliharaan, pemberian pakan, padat penebaran dan kontruksi kolam | Sosialisasi saat pembinaan kelapangan baik dalam bentuk penjelasan langsung, liflet dan juga pembuatan kolam-kolam percontohan di masing-masing sentra produksi |
| 2 | Tenaga teknis budidaya ikan masih terbatas, sedangkan sentra produksi yang cukup luas dan medan yang cukup berat sehingga belum optimalnya pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat pembudidaya ikan, sehingga banyak permohonan masyarakat yang belum terakomodir. | Perlu penambahan tenaga teknis yang siap dan mempu menjangkau wilayah-wilayah yang tersulit sekalipun serta pembekalan teknis yang berkesinam-bungan serta dukungan dana operasional yang memadai.  |
| 3 | Pelayanan Ijin dan Retribusi pengiriman ikan hias dan non ikan hias belum optimal dikarenakan mekanisme pembayaran dan percepatan pelayanan belum sejalan serta tidak berfungsinya dengan baik Himpunan Asosiasi Pengusaha Ikan Arowana Merauke (HAPIKAM) sebagai asosiasi yang menjembatani pengusaha dan pemerintah | Perlu adanya standar pelayanan yang ditetapkan bersama dengan para pengusaha agar pelayanan dapat berjalan secara optimal serta adanya asosiasi pengusaha yang sinergis dengan pemerintah kabupaten merauke |
| 4 | Belum Optimalnya Produksi Benih Di Balai Benih Ikan Lokal Wasur dikarenakan masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM sehingga pengelolaan produksi masih rendah (pengelolaan produksi antara lain : seleksi induk, proses pemijahan dan penanganan pasca pemijahan / *breeding*) | * SDM Balai Benih Ikan Lokal Wasur perlu ditambah khususnya tenaga teknis dan pelatihan secara berjenjeng agar terpenuhi standar yang ditetapkan
* Struktur BBIL Wasur untuk segera dapat di isi sehingga pengelolaan secara menyeluruh dapat berjalan dengan lancar
 |

* 1. **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang potensial bagi sumber pertumbuhan ekonomi serta merupakan sumber penghidupan masyarakat banyak dan harapan masa depan bangsa. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang terlibat dalam bisnis kelautan dan perikanan. Khususnya wilayah Kabupaten Merauke yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang besar, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan harus dilaksanakan dengan system bisnis perikanan yang terintegrasi mulai dari produksi, pengolahan sampai pemasaran.

Pola konsumsi masyarakat di era globalisasi saat ini sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dan pola pikir masyarakat (konsumen) yang selektif dalam memilih bahan pangan, oleh karena itu jaminan keamanan pangan menjadi sangat berperan.Jaminan keamanan produk perikanan mutlak diperlukan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi produk perikanan dengan mutu yang baik dalam arti khusus bebas dari bahan-bahan kimia berbahaya maupun logam berat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan dan pengolahan sejak ikan tersebut ditangkap, diproses atau diolah, kemudian dipasarkan sampai diterima oleh konsumen.

Ikan sebagai bahan pangan, memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, mudah dicerna, mengandung asam amino yang essensial dan seimbang serta penting bagi pemenuhan gizi masyarakat. Dengan berbagai kelebihan yang ada, ikan mempunyai kelemahan yaitu sifatnya yang mudah rusak (busuk) setelah ditangkap dan mati. Sebagai komoditas yang mudah rusak perlu penanganan yang cepat dan cermat untuk mempertahankan mutunya sejak ikan ditangkap dari air.

Seiring dengan melimpahnya hasil tangkapan nelayan, maka diperlukan cara-cara penanganan yang baik terhadap hasil tangkapan agar kesegaran ikan tetap terjaga. Secara umum penurunan mutu ikan disebabkan karena penanganan yang kurang baik dan sarana/prasarana diatas kapal maupun di tempat pendaratan ikan yang belum memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai salah satu Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke berfungsi meningkatkan mutu hasil perikanan dan mengembangkan usaha pengolahan serta pemasaran hasil perikanan, terutama yang dilakukan oleh pelaku usaha skala mikro atau kecil hingga skala makro melalui peningkatan sarana dan prasarana.

Dalam Tahun 2011, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan telah melaksanakan fungsinya dalam peningkatan sarana dan prasarana maupun dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada para pengusaha sebagai mitra masyarakat dan pemerintah.

* + 1. **Kedudukan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)**

Bidang P2HP merupakan Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang mempunyai tupoksi melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja bidang P2HP yang meliputi teknik pengolahan, usaha dan pemasaran serta Sarana prasarana pengolahan serta membuat laporan.

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang P2HP mengedepankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat lokal baik secara langsung ataupun melalui perantara dalam hal ini pedagang dan pengusaha yang bergerak dibidang perikanan.

**4.5.2 Potensi Olahan**

**1. Jenis ikan dan olahan yang telah dihasilkan di kabupaten Merauke**

1. Ikan Hiu

Hampir semua bagian dari tubuh ikan hiu dapat diolah dan pemasarannya dilakukan di luar daerah. Jenis olahannya berupa sirip ikan hiu, tulang ikan hiu, kulit ikan hiu dan daging ikan hiu. Daging ikan hiu yang dipasarkan berupa ikan hiu yang diasinkan dalam bentuk kanas (setengah basah) dan kering.

1. Ikan Kakap

Ikan kakap merupakan hasil tangkap yang bernilai ekonomis tinggi, dipasarkan di pasar lokal, antar pulau dan ekspor. Ikan kakap dijual dalam bentuk utuh *(whole),* fillet dan ikan asin. Jenis Kakap Putih merupakan salah satu komoditi unggulan hasil perikanan di Kabupaten Merauke karena jenis ikan kakap ini memiliki tekstur daging yang padat dan warna daging putih sehingga nilai jualnya pun tinggi.

Selain dagingnya, bagian tubuh ikan kakap yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah gelembung ikan. Gelembung ikan kakap yang dipasarkan dari jenis ikan kakap cina.

1. Ikan Pari

Dari ikan pari dapat diperoleh hasil olahan berupa kulit dan ekor ikan pari. Daerah pemasarannya ke Surabaya.

1. Ikan Gabus

Ikan gabus merupakan salah satu ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena mengandung protein yang cukup tinggi dan berkhasiat dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Ikan gabus di Kabupaten Merauke dimanfaatkan dalam bentuk segar dan kering

1. Ebi

Ebi merupakan salah satu bentuk awetan udang yang diolah dengan cara perembesan dan penjemuran. Ebi digunakan untuk penyedap rasa dalam masakan sayuran dan dapat disimpan berbulan-bulan

1. Teripang

Teripang merupakan salah satu komoditi hasil perikanan yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang berkadar protein tinggi. Pada umumnya teripang dijual dalam bentuk kering.

**2. Potensi yang Belum Diolah di Kabupaten Merauke**

 Dalam rangka meningkatkan keragaman produk hasil perikanan perlu adanya inovasi produk sesuai dengan potensi yang ada dengan mengkombinasikan bahan bakunya dengan produk hasil perikanan. Saat ini pengembangan produk olahan menjadi produk bernilai tambah berbasis produk perikanan di Kabupaten Merauke belum banyak dikembangkan. Beberapa UKM pengolahan yang ada lebih suka memproduksi jenis-jenis olahan hasil olahan yang sudah populer dimasyarakat seperti ikan asin, terasi dll.

Jenis ikan yang banyak terdapat di Kabupaten Merauke adalah ikan Kakap, tenggiri, gabus. Namun sampai saat ini jenis ikan tersebut hanya dipasarkan dalam bentuk segar dan kering. Padahal apabila dikembangkan lebih lanjut jenis ikan tersebut sangat potensial untuk pengembangan diversifikasi olahan seperti bakso ikan, siomay, nugget, pempek, abon, sosis ikan, kerupuk ikan/udang. Pengolahan limbah padat dari ikan juga belum di optimalkan seperti tulang ikan, sisik ikan dll. Tulang ikan dapat dibuat menjadi tepung ikan dan sisik ikan dapat dikembangkan menjadi suatu produk kerajinan .

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan produk olahan perikanan di Kabupaten Merauke yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara pengolahan atau proses pembuatan produk olahan tersebut sesuai SNI.
2. Kurangnya kegiatan pelatihan diversifikasi pengolahan hasil perikanan yang ditujukan kepada masyarakat baik kepada masyarakat pesisir, ibu rumah tangga atau kelompok PKK.

kurangnya sarana pengolahan yang dimiliki oleh masyarakat.

* + 1. **Teknik Pengolahan Hasil Perikanan**
1. **Pelatihan Pengolahan Ikan**

 Pelatihan pengolahan ikan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan pengolah yang telah melakukan usaha pengolahan selama ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Merauke tanggal 27 – 28 Juli 2011. Narasumber berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke dan Kepala BPPMHP Merauke, Peserta pelatihan berjumlah 20 orang yang berasal dari nelayan pengolah, dengan sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua TA. 2011

Materi pelatihan :

1. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Merauke
2. Teori dan praktek pembuatan kerupuk ikan
3. Teori dan praktek pembuatan ikan asin
4. Teori dan praktek pembuatan abon ikan
5. Teori dan praktek pembuatan bakso
6. Packing hasil olahan.
7. **Sosialisasi dan Penyuluhan Mutu Ikan**

 Maksud dan tujuan sosialisasi dan penyuluhan mutu ikan adalah

* + Melakukan pembinaan mutu ikan bagi nelayan, pengolah, pedagang dan konsumen.
	+ Meningkatkan pemahaman bagi nelayan, pengolah dan pedagang mengenai bahaya penggunaan bahan kimia terlarang

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel Akat Merauke tanggal 29 Oktober 2011, Narasumber berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke dan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Peserta berasal dari penjual dan pemasok ikan, pengolah ikan, pengurus PKK dan

Darma wanita. Sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua TA. 2011.

Materi sosialisasi dan penyuluhan mutu ikan yaitu :

* Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikana Kabupaten Merauke
* Sistem Rantai Dingin
* Review Kemunduruan Mutu Ikan
* Pengawasan Bahan Tambahan Pangan
* Pidana Pangan

**4.5.3 Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Sebagian besar pedagang di Kabupaten Merauke memasarkan produknya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saat ini ikan yang digemari masyarakat Kabupaten Merauke adalah ikan segar dan ikan kering. Pemasaran ikan olahan ada beberapa cara yaitu

1. pemasaran langsung kepada konsumen dalam kota Merauke
2. pemasaran ke luar kota Merauke (antar pulau)

Jalur distribusi ikan olahan cukup panjang sampai kepada konsumen, mulai dari produsen (nelayan), pengepul ikan, pengolah ikan, pedagang besar kemudian pedagang pengecer.

Bidang P2HP Melakukan pelayanan usaha kepada masyarakat yang akan mengirim produk olahannya ke luar kota Merauke. Pelayanan terrsebut berupa pengeluaran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Keterangan Mutu yang telah diubah menjadi Ijin Pengiriman Komoditi Perikanan.

1. **Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**

Surat Izin Usaha Perikanan adalah Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang atau Badan usaha untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya dan usaha pembudiyaan ikan untuk tujuan komersial dilaut atau perairan lainnya yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 menyatakan bahwa besaran tarif Retribusi penggantian biaya administrasi Ijin Usaha Pengolahan (IUP) Rp. 300.000/Tahun, Perda ini berlaku hingga Mei 2011 dikarenakan Perda No. 13 Tahun 2007 mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang menyatakan bahwa besaran tarif untuk SIUP sebesar Rp. 1000.000/ tahun, yang mulai berlaku 1 Juni 2011.

Tabel 24. Data Jumlah SIUP yang dikeluarkan oleh Bidang P2HP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TAHUN** | **BERBADAN HUKUM** | **PERORANGAN** | **JUMLAH** |
| 1 | 2009 | 11 | 12 | 23 |
| 2 | 2010 | 12 | 6 | 18 |
| 3 | 2011 | 16 | 22 | 36 |

Grafik 5. Jumlah SIUP yang dikeluarkan oleh Bidang P2HP

1. **Pengiriman Hasil Perikanan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan menyatakan bahwa Surat Keterangan Mutu (SKM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi teknis yang menerangkan tingkat mutu komoditi hasil perikanan yang akan diantarpulaukan. Berdasarkan Perda No. 14 tahun 2007 bidang P2HP telah keluarkan 50 SKM dari Januari s/d Oktober 2011.

Perda ini kemudian mengalami perubahan sehingga SKM digantikan menjadi IPKP sesuai dengan Peraturan Bupati No. 6 tahun 2011, yang menyatakan bahwa setiap peredaran komoditi perikanan yang keluar dari Kabupaten Merauke wajib memilki Izin Pengiriman komoditi Perikanan (IPKP) yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan kabupaten Merauke. Penerapan Peraturan bupati No. 6 Tahun 2011 dilakukan mulai November 2011.

Pengumpul dan pengirim hasil perikanan yang ada di Kabupaten Merauke, dengan jenis olahan seperti Sirip ikan Hiu, Gelembung ikan, Kulit ikan (Hiu, pari), kulit buaya, tulang ikan, teripang, Fillet ikan, ikan asin, ebi dll. Tujuan pemasaran adalah Jakarta, Surabaya, Makasar, Jayapura dan Sorong.

Tabel 25. Data Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** |  **Jenis Olahan** | **Jumlah/Tahun (Kg)** |
| **2009** | **2010** | **2011** |
| 1 | Sirip Hiu | 20.140 | 7.994 | 9.819 |
| 2 | Gelembung Ikan | 50.363 | 32.395 | 32.041 |
| 3 | Kulit Hiu | 41.115 | 18.805 | 31.561 |
| 4 | Kulit Pari | 250 | 1.200 | 17 |
| 5 | Tulang ikan | 21.425 | 8.915 | 18.734 |
| 6 | Terasi | 126.316 | 6.760 | - |
| 7 | Ebi | 7.377 | 8.000 | 1.040 |
| 8 | Ikan Asin | - | - | 172.760 |
| 9 | Teripang | - | - | 1.703 |
| 10 | Fillet ikan | - | - | 60.000 |
| 11 | Kulit Kakap | - | - | 624 |
| 12 | Kulit buaya | - | - | 949 |
| 13 | Udang beku | - | - | 200 |
|  | **TOTAL** | **266.986** | **84.069** | **329.448** |

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pengiriman produk olahan ke luar kota Merauke tahun 2011 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2010 baik dari segi jumlah maupun jenis produknya, hal ini dikarenakan mutu produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar persyaratan, karena mutu suatu produk berpengaruh terhadap tingginya permintaan dan nilai jual juga lebih tinggi, disamping itu hasil tangkapan banyak atau melimpah yang dipengaruhi oleh

musim. Hal ini merupakan trend positif bagi perkembangan pengirimanan komiditi perikanan yang harus tetap harus ditingkatkan baik dari segi mutu atau kualitas dan kuantitas agar produk yang dihasilkan dari Kabupaten Merauke tidak hanya beredar dalam pasar domestik namun mampu bersaing dipasar internasional.

Grafik 6. Pengiriman Produk hasil Perikanan Kab. Merauke

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berasal dari :

1. Retribusi penggantian biaya aministrasi Ijin Usaha Pengolahan (IUP) berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2007 sebesar Rp 300.000/Tahun, yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang menyatakan bahwa besaran tarif untuk SIUP sebesar Rp. 1000.000/ tahun
2. Retribusi hasil olahan perikanan dalam bentuk Surat Keterangan Mutu (KM) berdasarkan Perda No. 14 tahun 2007, besaran tarif retribusi tersebut diubah dalam Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2011 dalam bentuk Izin Pengiriman Komoditi perikanan (IPKP)

**Tabel 26. Daftar Tarif Retribusi Hasil Olahan Perikanan Berdasarkan Perda N0. 14 Tahun 2007**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KOMODITI** | **TARIF**  | **SATUAN** |
| 1 | Lobster, Udang Segar/Beku |  250,- | Kg |
| 2 | Ikan Segar/Beku | 125,- | Kg |
| 3 | Kodok Segar/beku | 125,- | Ekor |
| 4 | Ubur-ubur | 125,- | Kg |
| 5 | Rumput laut (kering/basah) | 125,- | Kg |
| 6 | Kerang,keong,kepiting (beku) | 250,- | Kg |
| 7 | Kerupuk ikan/Udang |  125,- | Kg |
| 8 | Ikan Asin/Kering |  125,- | Kg |
| 9 | Ebi |  250,- | Kg |
| 10 | Cumi-cumi Asin |  250,- | Kg |
| 11 | Teripang Asin | 1600,- | Kg |
| 12 | Telur Ikan | 600,- | Kg |
| 13 | Sirip Ikan Hiu | 2500,- | Kg |
| 14 | Kerang Asin |  150,- | Kg |
| 15 | Gelembung Ikan  | 1250,- | Kg |
| 16 | Tepung Ikan, Petis, Terasi Ikan/Udang, Abon Ikan, Dendeng Ikan dan Bakso Ikan |  250,- | Kg  |
| 17 | Pengalengan (Ikan/Kerang) |  250,- | Kg |
| 18 | Kecap ikan |  250,- | Kaleng |
| 19 | Kura-kura (Beku) |  250,- | Botol |
| 20 | Kulit Ikan |  350,- | Ekor |
|   | a.Ikan Hiu |  175,- | Kg  |
|   | b.Ikan Pari |  250,- | Kg |
|   | c.Ikan Lain |  150,- | Kg |
|   | d.Kulit Buaya | 1250.- | Kg |
| 21 | Tulang Ikan | 150,- | Kg |
| 22 | Lain-lain |  250,- | Kg |

**Tabel 27. Daftar Tarif Retribusi Hasil Olahan Perikanan Berdasarkan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2011**

|  |
| --- |
| **TARIF RETRIBUSI HASIL OLAHAN PERIKANAN** |
| **NO** | **JENIS PRODUK PERIKANAN** |  **HPI**  |  **TARIF**  |  **SATUAN**  |
|
| 1 | Ikan Fillet |  14.000  |  350  |  (Rp/Kg)  |
| 2 | Sirip Ikan Hiu |  200.000  |  5.000  |  (Rp/Kg)  |
| 3 | Gelembung Ikan : |   |   |   |
| Gelembung kakap cina |  400.000  |  10.000  |  (Rp/Kg)  |
| Gelembung ikan lainnya |  60.000  |  1.500  |  (Rp/Kg)  |
| 4 | Kulit ikan: |   |   |   |
| Kulit ikan Hiu  |  10.000  |  250  |  (Rp/Kg)  |
| Kulit ikan pari |  15.000  |  375  |  (Rp/Kg)  |
| kulit ikan lain |  8.000  |  200  |  (Rp/Kg)  |
| kulit buaya |  60.000  |  1.500  |  (Rp/Inch)  |
| 5 | Tulang ikan |  8.000  |  200  |  (Rp/Kg)  |
| 6 | Ikan kering / asin |  7.000  |  175  |  (Rp/Kg)  |
| 7 | Kerupuk ikan / udang |  6.000  |  150  |  (Rp/Kg)  |
| 8 | Ebi |  12.000  |  300  |  (Rp/Kg)  |
| 9 | Cumi-cumi kering /asin |  12.000  |  300  |  (Rp/Kg)  |
| 10 | Teripang kering / asin |  120.000  |  3.000  |  (Rp/Kg)  |
| 11 | Telur ikan |  30.000  |  750  |  (Rp/Kg)  |
| 12 | Kerang asin |  7.000  |  175  |  (Rp/Kg)  |
| 13 | Tepung ikan, petis, Terasi ikan/udang, Abon ikan, dendeng ikan dan bakso ikan |  12.000  |  300  |  (Rp/Kg)  |
| 14 | Pengalengan ikan |  16.000  |  400  |  (Rp/Kaleng)  |
| 15 | Kecap ikan |  12.000  |  300  |  (Rp/Botol)  |

**Tabel 28. Jumlah PAD Bidang P2HP Tahun 2011**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **BULAN** |  **JUMLAH (Rp)**  |
| 1 | JANUARI |  6.866.875  |
| 2 | PEBRUARI |  3.665.000  |
| 3 | MARET | -  |
| 4 | APRIL |  2.075.000  |
| 5 | MEI |  5.956.875  |
| 6 | JUNI |  907.500  |
| 7 | JULI |  137.500  |
| 8 | AGUSTUS |  1.000.000  |
| 9 | SEPTEMBER | -  |
| 10 | OKTOBER | -  |
| 11 | NOVEMBER |  33.872.000  |
| 12 | DESEMBER |  56.919.225  |
|  | ***TOTAL*** | ***111.399.975*** |

Berdasarkan data di atas, PAD Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mengalami peningkatan sebesar 31,28 % dari jumlah PAD tahun 2010 Rp. 76.556.879,- menjadi Rp. 111.399.975 pada tahun 2011.

**4.5.4 Kegiatan Pembangunan**

Pada tahun anggaran 2011, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melaksanakan 5 (lima) kegiatan pengadaan serta perencanaan dan pengawasan pembangunan pabrik es, antara lain Pengadaan Cool Box Penampung Ikan, Pengadaan Cool Box Penampung Udang, Pengadaan Ice Storage, Pemasangan Instalasi Listrik dan Pembangunan dudukan mesin ice storage.

1. **Pengadaan Cool Box Penampung Ikan**

Pengadaan Cool Box Penampung Ikan merupakam program tahun 2011 yang telah dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp 300.000.000,- dengan kapasitas 200 liter sebanyak 60 unit, sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU).

1. **Pengadaan Cool Box Penampung Udang**

Pengadaan Cool Box Penampung Udang merupakam program tahun 2011 yang telah dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp 123.620.000,-dengan kapasitas 35 liter sebanyak 200 unit, sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. **Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik di TPI**

Pengadaan Instalasi Listrik di TPI merupakam program tahun 2011 yang telah dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- yang bersumber dari dana DAU. Yang berlokasi di Bina Loka Kelurahan Samkai Distrik Merauke.

1. **Pengadaan Ice Storage**

Pengadaan ice storage merupakam program tahun 2011 yang telah dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 188.448.257,- yang bersumber dari dana DAU. Yang berlokasi di Bina Loka Kelurahan Samkai Distrik Merauke.

1. **Pembangunan Dudukan Mesin Ice Sorage**

Pembangunan dudukan mesin ice storage merupakan program tahun 2011 yang telah dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- yang bersumber dari dana DAU. Yang berlokasi di Bina Loka Kelurahan Samkai Distrik Merauke.

1. **Pembangunan Pabrik Es**

Pembangunan pabrik es merupakan program tahun 2011 yang telah dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 1.752.568.783,- yang bersumber dari dana DAK. Berlokasi di Bina Loka Kelurahan Samkai Distrik Merauke.

1. **Perencanaan dan pengawasan Pembangunan Pabrik Es**

Perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari telah dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 75.379.303,- dan pengawasan Teknis pembangunan Pabrik es kapasitas 15 ton/hari juga telah dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 56.534.477,- dengan sumber dana dari DAK.

**4.5.5 Permasalahan dan Kendala Pemasaran**

Wilayah Kabupaten Merauke yang sangat luas dan jarak tempuh yang sangat jauh antara satu distrik dengan distrik yang lain dengan infrastruktur jalan yang belum memadai menjadi kendala utama di lapangan. Kendala tersebut sangat mendasar dikarenakan dalam penanganan hasil perikanan dibutuhkan penanganan yang cepat, bersih dan higiene.

Dengan kondisi yang demikian maka sistem ***“rantai dingin”***  harus tetap dipertahankan sejak ikan ditangkap di atas kapal hingga pemasarannya ke konsumen. Rantai dingin *(cold chain system)* adalah suatu sistem pendinginan yang digunakan untuk mempertahankan kesegaran ikan sehingga ikan memiliki mutu yang baik dan bernilai jual tinggi.

Untuk itu perlu adanya pembinaan kepada nelayan dan pengusaha tentang penerapan sistem rantai dingin. Kendala penerapan sistem rantai dingin di lapangan adalah kurangnya produksi es, kurangnya jumlah *coolbox*, kurangnya jumlah *freezer/palka penampung* dan lokasi titik pengumpulan produksi/tangkapan nelayan masih belum dapat ditentukan dengan optimal (dengan memperhitungkan produksi dan biaya operasional untuk pengumpulan hasil tangkapan nelayan.

Sistem pengolahan yang baik dan benar adalah selalu memperhatikan suhu penanganan selama proses penangkapan ikan di atas kapal sampai dengan pemasarannya. Untuk itu, di kabupaten Merauke perlu dibangun Pasar Ikan Higiene*.* Dengan adanya Pasar Ikan Higiene, dapat menjamin mutu dan kualitas ikan yang dipasarkan ke konsumen, karena suhu pendinginan, sanitasi dan higiene sangat dapat diperhatikan dengan baik. Sehingga, ikan dapat dijual dengan nilai lebih tinggi.

Selain mutu yang dapat dipertahankan, harga jual ikan di pasar lokal juga dapat disamaratakan tidak membedakan harga jual ikan yang berasal dari masyarakat lokal atau pengusaha.

BAB V

**PENUTUP**

Demikian Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke tahun 2011 disusun sebagai bahan evaluasi kerja pada tahun 2012, semoga di masa yang akan datang diharapkan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dapat terus berkembang seiring dengan semangat “ Izakod Bekai Izakod Kai “ ( Satu Hati Satu Tujuan ) serta semangat reformasi, kerja keras, kerja sama dan dukungan semua pihak yang terkait.

Kabupaten Merauke setelah dimekarkan memiliki potensi sektor Perikanan dan Kelautan yang cukup besar. Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield) Laut Arafura adalah sebesar 232.500 ton per tahun. Jumlah produksi hasil perikanan Kabupaten Merauke tahun 2011 sebesar 36.340.305,8 Kg yang terdiri dari data eksport sebesar 33.795.660 Kg, data antar pulau sebesar 2.544.565,8 Kg. Potensi lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya air tawar seluas 26,56 ha dan untuk kegiatan budidaya air payau seluas 1,5 ha.

 Akhirnya potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, apabila dikelola sesuai dengan visinya, maka diharapkan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.